

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia akhir-akhir ini sedang melakukan upaya untuk meningkatkan perkembangan perekonomian masyarakat Indonesia melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan adanya bukti mempermudah suatu perizinan usaha melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan memberikan bantuan kepada pelaku UMKM. Ina Primiana (Wijoyo, 2021, hlm. 35) mengatakan bahwa, UMKM merupakan pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian guna mewadahi program prioritas serta pengembangan berbagai sektor dan potensi.

Dalam menjalankan suatu usaha, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, salah satunya adalah tantangan dalam aspek keuangan. Tantangan usaha dari segi aspek keuangan merupakan berbagai kesulitan yang berkaitan dengan pengelolaan dana dalam menjalankan dan mengembangkan suatu usaha. Beberapa tantangan tersebut antara lain adalah keterbatasan modal usaha, arus kas yang tidak stabil, pengelolaan keuangan yang kurang efektif, tingginya biaya operasional, risiko utang usaha, dan ketidakpastian pendapatan. Secara umum, tantangan keuangan dalam usaha menuntut pelaku usaha untuk memiliki perencanaan, pencatatan, dan pengelolaan keuangan yang baik agar usaha dapat berjalan secara berkelanjutan.

Irfan (2017, hlm. 3) menjelaskan bahwa pada umumnya usaha kecil tidak atau bahkan belum memiliki catatan akuntansi secara ketat dan disiplin dengan pembukuan yang teratur, baik dalam bentuk harian, mingguan, bulanan, dan seterusnya. Pemahaman akuntansi menjadi sangat penting bagi para pelaku UMKM. Untuk bisa memahami usaha dengan baik, harus paham akan dasar-dasar akuntansi. Dengan demikian dasar-dasar akuntansi mampu menjadikan informasi akuntansi sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mengelola usaha dengan baik.

Penelitian usaha kecil sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh Yunita Putri (2017) pada Usaha Toko Peralatan Olahraga di Pekanbaru dengan kesimpulan bahwa penerapan akuntansi toko peralatan olahraga dipekanbaru belum tepat dengan konsep dasar akuntansi. Sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Diharti (2019) pada Usaha Toko Barang Harian Di Kecamatan Tenan Raya Pekanbaru menyimpulkan bahwa sistem pencatatan usaha tersebut belum menerapkan sistem pencatatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Masalah keuangan terkait dengan UMKM sedikit berbeda dengan usaha berskala besar. Pada usaha berskala besar umumnya menggunakan metode akrual dalam pencatatan akuntansinya, sedangkan pada UMKM umumnya menggunakan metode berbasis kas yang mengakui pendapatan dan beban ketika kas diterima atau dikeluarkan. Walaupun akuntansi menyediakan informasi keuangan yang penting bagi kesuksesan UMKM tetapi sampai saat ini masih banyak UMKM yang belum menerapkan akuntansi dalam usahanya.

Sebagian besar pengusaha tidak mengetahui laba yang didapatkan, mereka menjawab bukan dengan nominal angka rupiah melainkan dengan benda-benda berwujud seperti motor, rumah, ataupun mobil. Jawaban tersebut tidak menggambarkan laba yang sebenarnya didapatkan oleh perusahaan karena itu merupakan salah satu penggunaan dana yang mungkin didanai dari laba atau justru dari utang ataupun pengambilan dari modal pemilik. Karena hal itulah peneliti ingin meneliti tentang penerapan akuntansi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon.

Ketika peneliti melakukan observasi awal dengan mewawancarai Ketua UMKM Kecamatan Purwakarta, beliau mengatakan bahwa pelaku UMKM sudah pernah melakukan pendampingan membuat Laporan Keuangan atau cara pencatatan akuntansinya dikarenakan minimnya pengetahuan tentang akuntansi sehingga pelaku UMKM mendapatkan pendampingan dari setiap pendamping yang sudah ditetapkan dari Ketua UMKM Kecamatan Purwakarta. Meskipun, sudah pernah dilakukannya pendampingan UMKM dari setiap kelurahan masih ada saja yang

tidak melakukan penerapan akuntansi pada usahanya. Sebagaimana ketika Ketua UMKM dan tim melakukan pendataan UMKM setiap bulannya ketika ditanyakan tentang omzet yang diperoleh kebanyakan dari pelaku UMKM tidak menyebutkan berapa nominal yang pasti, hanya menjawab dengan “ya segitu” dan hanya menjawab nominal taksiran tanpa adanya penerapan akuntansi pada usahanya.

Berdasarkan data yang didapat peneliti dari *website* Dinas Koperasi dan UKM Statistik Provinsi Banten data UMKM yang berada di Kota Cilegon cukup bervariasi mulai dari sektor jasa, perdagangan, dan juga industri dengan jumlah yang signifikan sampai dengan tahun 2018 mencapai jumlah 6.546 UMKM yang sudah terdaftar terpusat, dengan surat izin usaha berkisar 6.446 usaha mikro, 100 usaha kecil, dan 0 usaha menengah.

No	Kabupaten/Kota	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Jumlah UKM	% Mikro & Kecil
1	Kabupaten Lebak	49.498	825	15	50.338	0
2	Kabupaten Tangerang	41.155	0	0	41.155	0
3	Kabupaten Serang	22.667	3.958	284	26.909	0
4	Kota Tangerang	11.079	633	34	11.746	0
5	Kota Cilegon	6.446	100	0	6.546	0
6	Kota Serang	6.495	3.595	222	10.321	0
7	Kota Tangerang Selatan	7.094	2.488	0	9.582	0
8	Kabupaten Pandeglang	900	100	2	1.002	0

Gambar 1.1 Jumlah UMKM di Provinsi Banten 2018

Sumber: <https://statistik.bantenprov.go.id/ekonomi/koperasi>

Adapun data sebaran jumlah UMKM di Kota Cilegon pada tahun 2024, yaitu antara lain:

Tabel 1.1 Jumlah UMKM di Kota Cilegon Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah
1.	Cibeber	2.136
2.	Cilegon	1.450
3.	Citangkil	2.233
4.	Ciwandan	2.234
5.	Pulomerak	1.107
6.	Gerogol	1.345
7.	Jombang	1.467
8.	Purwakarta	1.235
	Total	13.207

Sumber: Data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak UMKM yang belum menerapkan akuntansi yang memadai. Menurut informasi melalui Ketua UMKM Kecamatan Purwakarta mengatakan bahwa hanya kurang lebih 40 unit usaha dari 344 unit usaha yang sudah benar-benar menerapkan akuntansi pada usahanya. Adapun data Usaha Mikro Kecil Menengah berdasarkan kategori usahanya, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah UMKM Per-Kategori di Kecamatan Purwakarta Tahun 2025

No.	Kategori	Jumlah
1.	Kuliner	112
2.	Fashion	103
3.	Furniture	8
4.	Jasa	85
5.	Kerajinan	14

6.	Herbal	2
	TOTAL	324

Sumber: *Data yang diperoleh dari Ketua UMKM Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon*

Menurut informasi dalam *Press Release* kegiatan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), mayoritas UMKM di Indonesia sulit mendapatkan pembiayaan dari perbankan dan sumber pendanaan lainnya karena UMKM tidak memiliki laporan keuangan yang memadai dan sesuai dengan standar yang berlaku di industri keuangan. Melihat pentingnya penerapan akuntansi bagi UMKM maka IAI selaku organisasi profesi sekaligus sebagai badan penyusun Standar Akuntansi Keuangan (SAK) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menyusun standar akuntansi yang sesuai dengan karakteristik UMKM. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan standar akuntansi untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas kepada publik. Diharapkan dengan adanya SAK ETAP perusahaan kecil dan menengah mampu menyusun laporan keuangannya untuk mendapatkan dana dan pengembangan usaha. Namun, standar yang ditetapkan ini masih dirasa sulit untuk diterapkan oleh UMKM sehingga IAI menyiapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Menengah (SAK EMKM) yang telah disahkan pada tanggal 24 Oktober 2016 dan rencananya akan berlaku efektif per 1 Januari 2018. Setelah ditetapkannya SAK EMKM ternyata sebagian besar pelaku atau pengelola UMKM ada yang masih tidak menerapkan akuntansi pada usaha mereka sebagai pelaporan dan juga informasi untuk mengetahui keadaan usahanya pada saat itu apakah sedang dalam keadaan baik atau sedang tidak baik. Peneliti juga ingin mengetahui apakah dalam pencacatan transaksi keuangan terdapat kendala atau tidak yang mungkin saja bisa menyebabkan pelaku UMKM tersebut tidak melakukan pencatatan keuangan pada usahanya.

Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ghuftron Ardiansyah (2022, hlm. 58) menyimpulkan bahwa Implementasi SAK EMKM oleh pelaku

usaha UMKM Nusantara Jaya Agung di Ds. Tlogosari, Kec. Tlogosari, Kab. Bondowoso masih tidak sesuai dengan apa yang sudah tertulis di SAK EMKM. Pelaku usaha hanya melakukan pencatatan laporan terhadap hal-hal yang sangat sensitif menurut pelaku yaitu pemasukan, dan persediaan barang, untuk pengeluaran sendiri hanya dicatat secara otomatis sesuai dengan data persediaan tanpa ada catatan lainnya seperti beban pajak, dan lain-lain. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rif'atul Fitriyyah, As'adi, dan Hermi Sularsih (2020, hlm. 185) menyimpulkan bahwa pemilik Usaha Sayangan dalam menyusun laporan pembukuan belum menyusun laporan posisi keuangan hal itu dikarenakan pemilik masih belum paham tentang penyusunan laporan pembukuan yang sesuai dengan standar. Pemilik membuat laporan pembukuan hanya yang bisa dipahami dan dimengerti oleh pemilik. Pemilik Usaha Sayangan tidak memperhatikan aktiva dan pasiva secara lebih jelas dan akurat. Pemilik juga tidak memperhitungkan harta kekayaan yang dimiliki pemilik dan tidak memperhitungkan kewajiban serta ekuitas yang dimiliki perusahaan. Sehingga dengan begitu dapat diketahui bahwa Usaha Sayangan tidak menerapkan SAK EMKM.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Diah Nabilah (2023, hlm. 636) menyimpulkan bahwa hingga saat ini Galeri Buket Sidoarjo masih belum membuat laporan atau pencatatan, sehingga Galeri Buket Sidoarjo juga belum bisa menerapkan SAK EMKM dalam bisnisnya. Ada beberapa kendala yang menyebabkan Galeri Buket Sidoarjo belum menerapkan laporan SAK EMKM hingga saat ini yaitu karena pihak pemilik bisnis buket ini masih belum ada waktu atau dalam menyusun laporan keuangan. dikarenakan belum memiliki karyawan, hal inilah yang menyebabkan tidak adanya waktu dalam menyusun laporan keuangan selain itu usahanya juga belum membutuhkan pembiayaan bank konvensional.

Dari masalah yang ditemukan baik secara umum maupun secara khusus di kecamatan purwakarta maka peneliti akan mengambil judul **“Tinjauan Penerapan Akuntansi dan Kesesuaiannya dengan SAK EMKM pada UMKM di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Tahun 2025”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagian besar pelaku UMKM tidak memiliki cukup pengetahuan tentang akuntansi dan tidak melakukan penerapan akuntansi pada usahanya berdasarkan observasi.
2. Penerapan akuntansi masih belum sesuai dengan SAK EMKM dikarenakan masih kurang pemahaman mengenai SAK EMKM.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntansi yang dilakukan oleh pelaku UMKM di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Tahun 2025?
2. Apakah penerapan akuntansi yang dilakukan oleh pengelola UMKM di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Tahun 2025 sudah mengacu pada standar SAK EMKM?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh pengelola UMKM di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Tahun 2025 dalam melakukan penerapan akuntansi yang mengacu pada SAK EMKM?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang dibuat peneliti maka peneliti mempunyai tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi yang dilakukan oleh pengelola UMKM di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Tahun 2025.
2. Untuk mengetahui penerapan akuntansi yang dilakukan oleh pengelola UMKM di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Tahun 2025, sudah mengacu pada SAK EMKM atau belum.

3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pengelola UMKM di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Tahun 2025 dalam melakukan penerapan akuntansi yang mengacu pada SAK EMKM dan memberikan solusi yang tepat atas kendala yang dihadapi pelaku UMKM.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis yang didapatkan dari penelitian, yaitu, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat tentang Penerapan Akuntansi dan Kesesuaiannya dengan SAK EMKM pada UMKM dan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu selama penelitian dan peneliti dapat mengembangkan ilmu yang telah diterima selama kuliah sehingga dapat memberikan sedikit sumbangsih keilmuannya selama penelitian berlangsung.

- b. Bagi Pelaku UMKM

Dengan adanya penelitian ini diharapkan Pengelola atau Pelaku UMKM dapat lebih banyak mengetahui tentang akuntansi dan menerapkan akuntansi yang sesuai dengan SAK EMKM sehingga nantinya dapat berguna bagi Pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan UMKM dan bisa menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas serta dapat mengambil keputusan dari informasi akuntansi yang sudah ada.

- c. Bagi Universitas

Dapat dijadikan sebagai bacaan atau referensi untuk mahasiswa Universitas Pasundan dalam mengetahui Penerapan Akuntansi pada UMKM dan juga kesesuaiannya dengan SAK EMKM.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Tinjauan Penerapan Akuntansi dan Kesesuaiannya dengan SAK EMKM pada UMKM Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Tahun 2025”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu :

1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia secara *online*, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik suatu kesimpulan. Kemudian arti kata tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari). Ada berbagai macam karya ilmiah, yaitu laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, surat pembaca, laporan kasus, laporan tinjauan, dan resensi. Laporan tinjauan adalah tulisan yang berisi tinjauan karya ilmiah dalam kurun waktu tertentu. Tugas akhir biasanya berupa hasil penelitian dari bidang tertentu (sesuai jurusan atau program studi yang diambil) yang kemudian diujikan secara lisan untuk memperoleh derajat kelulusan dan kelayakan karya tersebut.

Cresswell, John W. (2020) mengatakan bahwa tinjauan merupakan kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Kunish, dkk (2023) mengatakan bahwa tinjauan juga merupakan pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

2. Penerapan Akuntansi

Sasongko (2016, hlm. 2) mengatakan bahwa akuntansi adalah proses atau aktivitas yang menganalisis, mencatat, mengkalsifikasikan, mengikhtisarkan,

melaporkan, dan menginterpretasikan informasi keuangan untuk kepentingan para penggunanya. Proses akuntansi merupakan sebuah sistem yang mengukur kegiatan bisnis perusahaan. Sementara itu, menurut Priyati (Meilisa, dkk, 2019, hlm. 434) menjelaskan bahwa Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan data kuantitatif atau data berupa angka-angka, terutama yang mempunyai sifat keuangan dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dalam memilih alternatif-alternatif dari suatu keadaan.

Untuk dapat menyediakan data seperti yang dimaksud, maka setiap transaksi perlu adanya suatu penerapan akuntansi. Penerapan dapat di artikan sebagai pelaksana sistem akuntansi. Jika dijelaskan lebih rinci penerapan akuntansi adalah pelaksanaan suatu rangkaian prosedur perhitungan atau pengukuran dan penyimpanan informasi-informasi keuangan pada perusahaan atau badan usaha tertentu dalam suatu periode tertentu.

3. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

Surjaweni (2022, hlm. 44) mengatakan bahwa Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) merupakan standar yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tahun 2009, yang digunakan sebagai pedoman bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia agar dapat menyusun laporan keuangan bagi para penggunanya. Diterbitkannya SAK-ETAP bagi UMKM dengan tujuan agar para pelaku UMKM dapat meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas UMKM melalui informasi keuangan yang disajikan, sehingga UMKM dapat mengembangkan usahanya dengan bantuan kredit dan perbankan dan para calon investor potensial.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (Lestari, 2021, hlm. 28) mengatakan, “Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan pada entitas usaha tanpa akuntabilitas publik dengan penerbitan laporan keuangan yang umum untuk pengguna eksternal”. Pelaksanaan SAK ETAP bertujuan untuk mempermudah para pelaku usaha kecil dan menengah dalam penyusunan laporan keuangan sesuai standar yang ada.

Sehingga para pelaku UMKM merasa mudah, sederhana serta merasa tidak terbebani akan aturan yang ada. Dalam SAK-ETAP laporan keuangan yang lengkap terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam perkembangannya SAK ETAP ternyata kurang sederhana dalam penyusunan laporan keuangan UMKM, sehingga pada akhir 2016 IAI menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK-EMKM). “SAK-EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP, karena mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh UMKM” (SAK-EMKM, 2016). Laporan keuangan berdasarkan SAK-EMKM terdiri atas laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan perusahaan. Adanya SAK-EMKM ini diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan sehingga memudahkan para pelaku UMKM untuk dapat akses pendanaan dari berbagai lembaga keuangan (SAK-EMKM, 2016).

Penerbitan SAK EMKM ini adalah bentuk dukungan IAI sebagai organisasi profesi akuntan, dalam meningkatkan penegakan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan entitas, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia. Dengan kehadiran SAK EMKM ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM di Indonesia dalam Menyusun laporan keuangan sehingga memudahkan para pelaku UMKM mendapatkan akses pendanaan dari berbagai Lembaga keuangan.

4. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

UMKM atau Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2008.

Berikut ini merupakan definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008:

- a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
- b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
- c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan

G. Sistematika Skripsi

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dapat dirincikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian terhadap UMKM di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon. Pada akhir bab ini diberikan garis besar mengenai isi penelitian dalam sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Pada BAB II diuraikan teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan isu dan tujuan penelitian yang diangkat dalam skripsi. Uraian yang terdapat dalam telaah pustaka diharapkan dapat memberikan landasan ilmiah tentang perumusan metode dan arah penelitian serta pemecahan masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab III ini menjelaskan secara sistematis dan terperinci langkah-langkah dan cara yang digunakan dalam menjawab permasalahan dan memperoleh simpulan.

Bab ini berisi Metode penelitian meliputi Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB IV menguraikan tentang hasil penelitian mengenai objek penelitian yaitu UMKM di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon serta menganalisis data secara menyeluruh sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

BAB V PENUTUP

Pada BAB V meliputi kesimpulan yang merupakan uraian secara ringkas dan jelas terkait dengan pembahasan hasil penelitian, keterbatasan penelitian berisi kendala yang dihadapi peneliti dalam melaksanakan penelitian, dan saran untuk penelitian berikutnya yang merupakan pertimbangan peneliti bagi pihak-pihak yang memanfaatkan hasil penelitian tersebut.